

RINGKASAN

**DIANDRA AYASHA
SOESMAN
207410101029**

**PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(Studi Penelitian di PT Bank Aceh Syariah Cabang
Samudera Lhokseumawe).
Dr. Faisal S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr. Sulaiman, S.H.,
M.Hum**

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur kewajiban bank syariah menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada sektor UMKM secara bertahap melalui akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran bank syariah dalam mendukung perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe hadir sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan UMKM. Data realisasi pembiayaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah nasabah musyarakah dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun secara keseluruhan akad murabahah masih lebih dominan dibandingkan musyarakah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat Qanun LKS yang mendorong akad bagi hasil dengan praktik pembiayaan di lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan bank dalam menjalankan amanat qanun tersebut

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan penerapan Qanun LKS dalam pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun LKS pada pembiayaan musyarakah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Lhokseumawe sudah berjalan sesuai prinsip syariah, ditandai dengan adanya peningkatan jumlah nasabah *musyarakah* dari tahun ke tahun. Bank juga telah mengembangkan produk berbasis bagi hasil seperti KUR Syariah dan *Musyarakah Mutanaqhisah*. Namun demikian, pembiayaan masih didominasi akad *murabahah*, sementara *musyarakah* menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah, ketidaksesuaian kebutuhan usaha dengan akad yang ditawarkan, serta risiko gagal bayar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, bank melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi, serta upaya represif berupa pengawasan, monitoring, dan penagihan kepada nasabah.

Disarankan agar PT Bank Aceh Syariah lebih agresif mengembangkan diversifikasi dan inovasi produk musyarakah yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, sekaligus meningkatkan edukasi serta pendampingan manajemen usaha bagi nasabah guna meminimalkan risiko gagal bayar. Bank juga perlu memperkuat sistem monitoring dan mitigasi risiko berbasis teknologi untuk menjaga transparansi bagi hasil, sementara pemerintah daerah dan regulator diharapkan melakukan evaluasi periodik terhadap target rasio pembiayaan agar lebih realistis dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh.

Kata Kunci: *Penerapan, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan Musyarakah..*

SUMMARY

**DIANDRA AYASHA
SOESMAN
207410101029**

**APPLICATION OF ACEH QANUN NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN
MUSYARAKAH FINANCING**

**(Research Study at PT Bank Aceh Syariah Samudera
Lhokseumawe Branch).**

**Dr. Faisal S.Ag., S.H., M.Hum and Dr. Sulaiman, S.H.,
M.Hum**

Aceh Regional Regulation Number 11 of 2018 says that Islamic banks must slowly provide profit-sharing financing to small and medium-sized enterprises (MSMEs) using *mudharabah*, *musyarakah*, or other contracts that follow Islamic rules. This provision is intended to strengthen the role of Islamic banks in supporting the community's economy sustainably. PT Bank Aceh Syariah Samudera Branch in Lhokseumawe is present as one of the Islamic financial institutions that provides financing for MSMEs. Financing realization data shows an increase in the number of *musyarakah* customers from 2020 to 2023, although overall the *murabahah* contract is still more dominant than *musyarakah*. This phenomenon indicates a gap between the mandate of the LKS Law, which encourages profit-sharing contracts, and financing practices in the field.

This research aims to analyze the implementation of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions on *musyarakah* financing at PT Bank Aceh Syariah Samudera Lhokseumawe Branch, as well as to identify the obstacles and efforts made by the bank in carrying out the mandate of the qanun.

This research uses a qualitative method with an empirical legal approach through interviews, documentation, and literature studies. The data obtained were then analyzed descriptively-analytically to describe the implementation of Qanun LKS in *musyarakah* financing at PT Bank Aceh Syariah Samudera Lhokseumawe Branch.

Based on the research results, it shows that the implementation of Qanun LKS in *musyarakah* financing at PT Bank Aceh Syariah Samudera Lhokseumawe Branch has been running in accordance with sharia principles, as evidenced by the increasing number of *musyarakah* customers year after year. The bank has also developed profit-sharing products such as Sharia KUR and *Musyarakah Mutanaqhisah*. However, financing is still dominated by the *murabahah* contract, while *musyarakah* faces obstacles such as a lack of customer understanding, the mismatch between business needs and the contract offered, and the risk of default. To overcome these obstacles, banks are taking preventive measures through socialization and education, as well as repressive measures such as supervision, monitoring, and debt collection from customers..

It is recommended that PT Bank Aceh Syariah Samudera Branch in Lhokseumawe City be more aggressive in developing diversification and innovation of *musyarakah* products that meet the needs of MSMEs, while also increasing education and business management assistance for customers to minimize the risk of default. The bank also needs to strengthen its technology-based monitoring and risk mitigation system to maintain transparency in profit sharing, while local governments and regulators are expected to conduct periodic evaluations of financing ratio targets to make them more realistic and effective in driving the growth of Islamic economics in Aceh.

Keyword: Implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2018, Islamic Financial Institutions, Musyarakah Financing.